



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMANDUS FRENALDY
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 432803

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.605.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/139 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
3. Tanah Seluas 735 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
4. Tanah Seluas 4260 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 25000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 45.000.000
7. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 45.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 2970 m2/2970 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
9. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
10. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 80.528.300**



1. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF 71 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA AFX12U21CD8 M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.028.300
3. MOTOR, HONDA GL 200 R Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	102.420.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.835.614.932
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.623.563.232
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.623.563.232

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.